

PETANI MENJERIT, KETUA DPRD SUMBAWA SURATI PRESIDEN



<https://ekonomibisnis.com/>

Sumbawa Besar- Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq menyurati presiden terkait anjloknya harga gabah di Kabupaten Sumbawa. Melalui langkah tersebut, diharapkan gudang mitra bulog dapat dimanfaatkan untuk menyerap gabah petani.

“Hari ini DPRD Kabupaten Sumbawa akan menyurati Presiden Republik Indonesia terkait dengan diperbolehkannya dipergunakan gudang-gudang mitra bulog di Kabupaten Sumbawa. Sehingga tidak ada alasan lagi bulog tidak membeli gabah petani. Insya Allah ketika itu kita lakukan harga gabah tentu akan meningkat,” kata Rafiq saat mengikuti kegiatan Panen Perdana Padi Kegiatan Sistem Pertanian Berkelanjutan di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Rabu, 23 Maret 2022.

Menurut Rafiq, persoalan petani ini adalah hal krusial yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, tidak ada artinya swasembada pangan tetapi harga gabah anjlok. Informasi yang diperoleh harga gabah berada di angka Rp 3.200/kg. Persoalan ini juga sudah dibahas bersama Dinas Pertanian dan Bulog. Namun belum ada solusi segera karena pihak bulog belum bisa melakukan penyerapan untuk menstabilkan harga lantaran gudang dalam kondisi penuh. Solusi lain yang sempat ditawarkan adalah memanfaatkan gudang-gudang mitra bulog. Tetapi ada instruksi dari Bulog Pusat bahwa gudang mitra bulog tidak bisa digunakan. Sehingga pihaknya menyurati presiden terkait penggunaan gudang mitra bulog tersebut.

“Itulah langkah yang harus segera kita lakukan. Lembaga akan melakukan langkah dan upaya itu,” pungkasnya. **(ind)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, harga-gabah-anjlok-ketua-dprd-sumbawa-surati-presiden, 24 Maret 2022
2. <https://nusramedia.com/petani-menjerit-ketua-dprd-sumbawa-surati-presiden>, 23 Maret 2022

Catatan:

Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras yang selanjutnya disebut HPP Gabah atau Beras adalah harga pembelian gabah atau beras olehn Pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan Pemerintah, berupa cadangan beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu.¹

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah untuk gabah atau beras, Menteri menetapkan HPP Gabah atau Beras.²

HPP Gabah atau Beras ditetapkan dengan ketentuan:

1. harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10% (sepuluh persen) sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di petani atau Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 3% (tiga persen) sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan atau Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen) sebesar Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di Gudang Perum BULOG.³

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras

² Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras

³ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras

Kebijakan pengadaan gabah atau beras Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Perum BULOG.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras